

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Fasilitas publik merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan daerah. Suatu era pemerintahan dianggap berhasil jika pelayanan fasilitas publik dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, ketersediaan fasilitas publik menjadi salah satu indikator *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menyadari hal itu, dalam rangka mewujudkan “Bandung Juara” yang menjadi visi era pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018 berusaha untuk memperbaiki fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, salah satunya menyediakan berbagai taman tematik di setiap sudut Kota Bandung.

Sebagai salah satu fasilitas publik di Kota Bandung, keberadaan Taman Tematik Inklusi sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut didasarkan setidaknya pada dua alasan. *Pertama*, keberadaan taman tematik inklusi Kota Bandung disediakan sebagai bentuk penyetaraan hak-hak fasilitas publik berupa aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, keberadaan taman tematik inklusi Kota Bandung merupakan sarana untuk meningkatkan mental dan kepercayaan diri para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan masyarakat umum lainnya. Oleh karenanya perlu dilakukannya analisis kebijakan publik yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan taman tematik inklusi sebagai bentuk pengawasan dan penjaminan atas aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.

Ikhwal penyediaan fasilitas publik, selama kepemimpinan Ridwan Kamil telah banyak tercatat beberapa inovasi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pertama, perbaikan fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Kota Bandung. Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan fasilitas pejalan kaki sebelumnya banyak terganggu oleh pedagang kaki lima maupun kondisinya sendiri yang sempit. Setelah adanya perbaikan oleh Pemerintah Kota Bandung,

Irma Pujiani, 2018

AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (TUNANETRA) SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

saat ini fasilitas tersebut mengalami perubahan menjadi lebih luas dan lebih nyaman dengan fasilitas tambahan lainnya seperti tempat duduk umum dan tanaman-tanaman hias.

Kedua, penyediaan kendaraan umum gratis bagi siswa-siswa di Kota Bandung. Hal ini telah terlihat di beberapa titik yang telah ditentukan sehingga dapat mengakses berbagai sekolah yang dilalui oleh siswa. Penyediaan fasilitas ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan yang dialami oleh siswa. Ketiga, penyediaan taman-taman tematik di setiap sudut Kota Bandung. Adanya beberapa taman tematik ini sangat menarik perhatian seluruh masyarakat Kota Bandung, bahkan di daerah lainnya. Alasannya, selain memperindah tata ruang kota, keberadaan taman tematik ini juga menjadi fasilitas yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pada praktiknya, khusus bagi penyandang disabilitas pun belum sepenuhnya dapat difasilitasi secara optimal oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara fakta dan hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Fisik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Fisik, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Kemudian dalam pasal 30 dijelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. Aksesibilitas pada jalan umum;
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
- d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
- e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan.

Aksesibilitas penyandang cacat fisik merupakan salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung guna mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang cacat

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Realitasnya dalam pengaplikasian atau implementasi di lapangan, produk kebijakan tersebut belum maksimal. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Penyandang Disabilitas di Kota Bandung**

No.	Jenis Penyandang	2012
1.	Penyandang Disabilitas	5.069 orang
2.	Penyandang Disabilitas Anak	1.060 orang
<b>Jumlah</b>		<b>6.129 orang</b>

*Sumber: dokumen LKIP Dinas Sosial Tahun 2014.*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandung Tahun 2017 cukup banyak. Maka dari itu, penyandang disabilitas berhak menggunakan fasilitas publik terutamanya Taman Tematik yang ada di Kota Bandung. Mengingat aksesibilitas fasilitas publik menjadi penting bagi penyandang disabilitas dikarenakan tanpa aksesibilitas tersebut mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas.

Berdasarkan studi pendahuluan, semua taman tematik yang ada di Kota Bandung telah tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut diantaranya jalan khusus bagi penyandang disabilitas, fasilitas penyangga bagi mobilitas penyandang disabilitas dan fasilitas lainnya. Tetapi pada kenyataannya, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penyandang disabilitas. Ada beberapa penyebab fasilitas tersebut belum dapat dirasakan optimal oleh penyandang disabilitas, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Data Awal mengenai Penyebab Aksesibilitas Fasilitas Publik Belum Maksimal Bagi Penyandang Disabilitas di Lokasi Taman Inklusi Kota Bandung**

No.	Masalah	Jumlah
1.	Pedagang kaki lima	<b>103</b>
2.	Fasilitas disabilitas menjadi lahan parkir	<b>3</b>
<b>Total</b>		<b>106</b>

*Sumber: Hasil Studi Pendahuluan oleh Peneliti, September 2017.*

Awalnya, banyak pedagang kaki lima yang menjadikan fasilitas penyandang disabilitas sebagai lahan untuk berdagang. Selanjutnya, penggunaan fasilitas disabilitas menjadi lahan parkir oleh sebagian oknum. Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan kenyamanan bagi penyandang disabilitas terganggu dan terhambat. Sayangnya dalam beberapa kasus belum ada tindakan tegas dari aparat setempat. Padahal Pemerintah Kota Bandung bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati dan berangkat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya agar setiap orang termasuk penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak yang sama. Rahayu dan Utami (2013) dalam artikelnya yang berjudul Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa:

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif, seperti tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tentang pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan untuk kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, ketersediaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu, serta kemudahan dan keterjangkauan. (hlm. 3)

Sebagaimana penjelasan tersebut, harus ada inklusifitas bagi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Semestinya pelayanan fasilitas publik penting memerhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat terutama pada kaum difabel yang masuk ke dalam kelompok rentan.

Melihat permasalahan di atas, tentu Pemerintah Kota Bandung mesti memaksimalkan kembali Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Fisik. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang cacat sebagaimana masyarakat yang lainnya. Salah satu alat kendali pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu melalui suatu alat yang disebut dengan *public policy* atau kebijakan publik. Adapun kebijakan publik yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Fisik.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berupaya untuk melihat sejauhmana “*Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) sebagai*

*Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 (Studi Kasus di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung)*”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Setelah menguraikan latar belakang sebagai fokus permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah sebagai upaya untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas (Tunanetra) di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan penyandang disabilitas (tunanetra) terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?
3. Bagaimana hambatan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan merupakan alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sugiyono (2015, hlm. 397) mengemukakan bahwa secara

umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Arti menemukan disini bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum ada yang meneliti atau mengetahui. Sesuai perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, menggambarkan, mengetahui tentang Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 yang dianggap erat hubungannya dengan mata kuliah Kebijakan Publik.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang:

1. Aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang (tunanetra) disabilitas sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.
2. Pandangan penyandang disabilitas (tunanetra) terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.
3. Hambatan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.
4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Dari Segi Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas (tunanetra) di Taman

tematik Inklusi Kota Bandung, sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan taman tematik Inklusi tersebut dengan nyaman dan aman.

Penelitian ini memiliki peranan penting bagi mahasiswa PKn yang mana jika dilihat dari objek kajian *civics* salah satunya adalah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Sistem Politik Indonesia. Penelitian ini memberikan deskriptif mengenai salah satu dari objek kajian itu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### **1.4.2 Dari Segi Praktis**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus ke lapangan sehingga penulis bisa mendapatkan pengalaman secara langsung di lapangan mengenai aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas (tunanetra) Taman Tematik Inklusi di Kota Bandung. Agar penulis dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi aksesibilitas di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung tersebut.

#### **1.4.3 Dari Segi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai implementasi kebijakan bagi seluruh elemen yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemikiran dan analisisnya untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Bandung memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan Kota Bandung yang tertib dan aman melalui pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### **1.4.4 Dari Segi Isu serta Aksi Sosial**

Penelitian ini diharapkan beberapa sumbangsih, antara lain: (1) dapat mendukung penyelenggaraan kebijakan Bandung sebagai Kota ramah warga; (2) dapat dijadikan rujukan bagi evaluasi atas penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009, dan (3) sebagai bentuk dorongan kampanye bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul,

pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

### **2. BAB II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **3. BAB III: Metode penelitian**

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

### **4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

### **5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.